

ISU Sepekan

BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

Minggu ke-3 Oktober 2021 (tanggal 15 s.d 21 Oktober)

PENGAWASAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA

Anin Dhita Kiky Amrynudin
Peneliti Pertama/Politik Dalam Negeri
anin.amrynudin@dpr.go.id



**Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI**



ISU ATAU PERMASALAHAN

Daftar kepala daerah yang terjerat kasus korupsi seakan semakin panjang pasca-ditangkapnya Bupati Musi Banyuasin (Muba) Sumatera Selatan yaitu Dodi Reza Alex Noerdin. Belum lama ayah dari Dodi yaitu eks Gubernur Sumsel juga ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pembelian gas bumi oleh Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumsel tahun 2010-2019. Menurut Deputy Pencegahan KPK, kasus tersebut dianggap hanya puncak gunung es rasuah, yang bisa saja di pemerintahan daerah lain terdapat kasus serupa.

Segala cara telah dilakukan untuk menutup celah rasuah di sektor Pengadaan Barang & Jasa (PBJ). Berbagai program dikeluarkan pemerintah untuk mengatasinya seperti e-lelang, e-catalog, aplikasi BELA PENGADAAN (Belanja Pengadaan) yang dikelola oleh LKPP melalui kerjasama dengan *e-commerce*. Namun kenyataannya, kasus korupsi di sektor PBJ terus terjadi. Imbas dari praktik korupsi PBJ akan menghasilkan capaian yang buruk yaitu mutu barang yang didapatkan akan dibawah standar yang sudah ditetapkan dalam perencanaan. Selain hal teknis, faktor politis seperti permasalahan mahal nya biaya politik dan dinasti politik menjadi penyebab sulitnya memberantas korupsi di sektor PBJ. Sehingga dibutuhkan mekanisme tertentu dalam hal penataan internal partai untuk menghindari partai menjadi oligarki.



SUMBER

Media Indonesia, 18 Oktober 2021; Kompas, 18 Oktober 2021.